

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2014–2023 melalui metode Two-Step SYS-GMM, kemandirian fiskal daerah masih tergolong lemah. Kondisi tersebut tampak dari masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada transfer pusat. Pertumbuhan ekonomi memberi dampak positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah karena geliat aktivitas ekonomi dapat memperluas ruang penerimaan serta menguatkan daya fiskal pemerintah setempat. Pajak daerah juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, sehingga berperan sebagai sumber pendapatan penting untuk menopang pembiayaan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri.

Peningkatan pajak daerah memperlihatkan kesanggupan pemerintah daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih optimal. Besarnya aliran transfer pusat justru memperbesar ketergantungan fiskal, sehingga ruang daerah untuk membiayai pembangunan dan layanan pemerintahan secara otonom menjadi semakin terbatas. Ketiga variabel tersebut berkaitan dengan otonomi keuangan daerah, namun penguatan pajak daerah menjadi langkah paling taktis untuk menaikkan kapasitas fiskal..

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, rekomendasi berikut dapat diajukan untuk mendorong penguatan kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat:

1. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat perlu meningkatkan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya melalui intensifikasi dan perluasan pajak daerah. Hal ini dapat dicapai dengan

memperbaiki sistem pengumpulan pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, dan memanfaatkan digitalisasi dalam administrasi pajak daerah.

2. Pemerintah kabupaten/kota perlu menumbuhkan ekonomi yang lebih merata dengan bertumpu pada kekuatan lokal. Penguatan sektor andalan, masuknya investasi, dan suasana usaha yang ramah dapat memperluas sumber pajak serta menjaga pendapatan daerah tetap berlanjut.
3. Ketergantungan pada dana perimbangan perlu ditekan secara perlahan. Dana transfer sebaiknya dipakai sebagai pemantik untuk memperbesar daya ekonomi dan ruang fiskal, bukan dijadikan sandaran utama pembiayaan daerah.
4. Mutu tata kelola keuangan daerah perlu ditajamkan agar lebih hemat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang diarahkan pada sasaran nyata akan memperkuat hasil pembangunan serta menumbuhkan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji kemandirian keuangan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan fiskal terbaru, termasuk kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan sistem transfer ke daerah yang terus berkembang. Penelitian berikutnya dapat mengurai variabel dana perimbangan menjadi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemisahan tersebut membantu pembacaan pengaruh tiap jenis transfer terhadap kemandirian keuangan daerah secara lebih tajam dan mendalam.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan karena kebijakan fiskal dan keuangan daerah terus bergerak mengikuti perubahan regulasi. Pada masa pengamatan, pemerintah pusat mengubah tata kelola hubungan keuangan pusat dan daerah melalui penyesuaian mekanisme transfer dana perimbangan serta penerapan UU HKPD. Pergeseran aturan tersebut dapat memengaruhi cara daerah mengatur keuangannya dan menentukan ruang fiskal tiap wilayah. Kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku saat ini juga berpotensi mengubah susunan belanja daerah, arah pembangunan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana secara

optimal. Situasi tersebut membuat hasil penelitian ini belum sepenuhnya menangkap dampak kebijakan fiskal terbaru terhadap kemandirian keuangan daerah.

Perekonomian selama periode penelitian turut dipengaruhi oleh faktor luar, seperti perlambatan ekonomi dan pandemi COVID-19. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas ekonomi daerah, penerimaan pajak daerah, serta kapasitas fiskal pemerintah daerah. Perbedaan kekuatan ekonomi antar kabupaten/kota di Sumatera Barat juga membuat keadaan keuangan daerah tampil beragam dan berubah-ubah. Hasil penelitian ini perlu dibaca sesuai konteks ekonomi serta kebijakan fiskal yang berlaku pada periode pengamatan.

